INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022

I. Pendahuluan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Dae-rah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Laporan Penye-lengaraan Pemerintahan Daerah yang Disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bireuen kepada masyarakat ini, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sebagai penjabaran program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen. Laporan ini juga menjadi salah satu indikator kinerja, sarana komunikasi dan acuan pengawasan Masyarakat serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bireuen.

II. Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Aspek manajerial dan keuangan tetap merupakan unsur penting dalam membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bi-reuen terus mengupayakan peningkatan kinerja Aparatur dan peningkatan penerimaan Dae-rah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta membangun komunikasi dengan Pemerintah guna memperoleh perimbangan keuangan secara adil dan profesional.

Upaya intensifikasi antara lain dilakukan melalui sosialisasi untuk menggugah dan menyadarkan Masyarakat agar senantiasa memenuhi kewajibannya, baik dalam membayar pajak, retribusi maupun menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022, telah dilakukan berbagai upaya antara lain pendataan objek pajak yang lebih akurat, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, kerjasama dengan instansi terkait, peningkatan kesadaran dan keterampilan petugas pajak serta upaya ekstensifikasi dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru secara lebih intensif.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022. PAD di-rencanakan sebesar Rp 169.212.472.628,00 dengan realisasi sebesar Rp 180.778.532.735,26 atau 106,84%. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp 1.703.362.569.971,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.689.315.159.294,09 atau 99,18%. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah di-rencanakan sebesar Rp 47.328.330.603,00 dengan realisasi sebesar Rp 45.307.459.116,00 atau 95,73%.

Anggaran belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bireuen direncanakan sebesar Rp 2.001.710.922.925,00 dan realisasinya sebesar Rp 1.915.594.279.971,36 atau 95,70%. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Sementara itu, belanja transfer yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pemerinta-han Kabupaten Bireuen direncanakan sebesar Rp 531.688.298.175,00 dan realisasinya sebesar Rp 531.446.944.726,00 atau 99,95%. Transfer tersebut terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

III. Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 Ber dasarkan Urusan

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pela-yanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen terdiri dari beberapa bidang urusan. Secara lebih rinci, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan berbagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berbagai program prioritas.

1. Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.

Urusan Penunjang dilaksanakan dalam beberapa urusan program yaitu Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 32.139.315.681,00 dengan realisasi sebe-sar Rp 30.953.635.523,00 atau 96,31%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Program Perekonomian dan Pembangunan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 34.017.454.671,00 dengan realisasi sebesar Rp 33.515.317.225,00 atau 98,52%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/Kota, Program Dukungan Pelaksanaan Tu-gas dan Fungsi DPRD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2022 mendapat alokasi ang-garan sebesar Rp 8.146.573.372,00 dengan realisasi Rp 7.975.028.754,00 atau 97,89%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Urusan Keuangan telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 586.689.406.730,00 dengan real-isasi sebesar Rp 581.240.783.083,00 atau 99,07%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 8.084.314.363,00 dengan realisasi Rp 7.819.282.126,00 atau 96,72%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Pe-nunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Dae-rah, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Inspektorat pada tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6.811.013.763,00 dengan realisasi Rp 6.678.990.468,00 atau 98,06%. Adapun pro-gram yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/Kota, dan Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.140.269.792,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.758.422.056,00 atau 87,84%. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karak-ter Kebangsaan, Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, Program Pem-berdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Urusan Kewilayahan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh 17 SKPK yang rinciannya sebagai berikut :

No	SKPK / Program	Anggaran	Realisasi
	KEWILAYAHAN	**60.857.100.659,00**	**59.305.077.402,00**
1	KECAMATAN SAMALANGA	5.135.857.408,00	5.034.175.531,00
2	KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM	3.827.596.397,00	3.730.085.453,00
3	KECAMATAN PANDRAH	2.772.711.788,00	2.709.935.024,00
4	KECAMATAN JEUNIEB	4.540.489.441,00	4.433.607.005,00
5	KECAMATAN PEULIMBANG	2.886.851.937,00	2.846.706.220,00
6	KECAMATAN PEUDADA	3.464.103.754,00	3.333.956.407,00
7	KECAMATAN JEUMPA	3.635.042.172,00	3.547.262.972,00
8	KECAMATAN KOTA JUANG	3.253.439.715,00	3.163.046.190,00
9	KECAMATAN KUALA	2.643.487.132,00	2.553.226.899,00
10	KECAMATAN JULI	2.927.836.122,00	2.830.512.980,00
11	KECAMATAN PEUSANGAN	5.993.231.887,00	5.849.153.050,00
12	KECAMATAN JANGKA	3.854.112.567,00	3.742.080.098,00
13	KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	3.365.843.323,00	3.267.078.266,00
14	KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN	2.717.851.218,00	2.647.448.140,00
15	KECAMATAN KUTA BLANG	3.644.711.807,00	3.556.663.036,00
16	KECAMATAN MAKMUR	2.526.113.651,00	2.465.777.941,00
17	KECAMATAN GANDAPURA	3.667.820.340,00	3.581.272.190,00

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Da-sar di Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyelenggaran urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 473.740.816.385,00 dengan realisasi Rp 442.112.509.426,36 atau 93,32%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program – program bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, serta Program Pengelolaan Permuseuman.

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 180.201.797.283,00 dengan realisasi Rp 169.292.074.572,00 atau 93,94%. Adapun pro-gram yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu-paten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program dan kegiatan kesehatan yang dilaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen pada tahun 2022 sebesar Rp 170.734.733.841,00 dengan realisasi anggaran Rp. 165.905.456.967,00 atau 97,17%. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 177.363.411.521,00 dan realisasi sebesar Rp 175.500.014.101,00 atau 98,94%. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Pro-gram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengel-olaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, dan Program Penyelenggaraan Pe-nataan Ruang.

Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 4.484.879.835,00 dan realisasi sebesar Rp 4.383.879.825,00 atau 97,74%. Adapun Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kawasan Permukiman, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Urusan Penanggulangan Bencana Daerah, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 7.033.592.130,00 dengan realisasi Rp 6.845.755.772,00 atau 97,32%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Penanggulangan Bencana.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.457.608.324,00 dengan realisasi Rp 5.366.336.032,00 atau 98,32%. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Alokasi anggaran pada ta-hun 2022 sebesar Rp 6.878.370.395,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.710.187.875,00 atau 97,55%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program penanganan Bencana,

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.967.520.728,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.869.044.537,00 atau 98,01%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

3. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pela-yanan Dasar di Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Per-pustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 5.406.157.119,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.280.194.712,00 atau 97,67%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hu-bungan Industrial, Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi dan Program Pengembangan Kawasan Trasmigrasi.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 22.277.984.492,00 dengan realisasi anggaran Rp. 19.536.845.087,00 atau 87,69%. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengarusuta-maan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak, Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan,Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 17.043.670.500,00 dengan realiasi sebesar Rp 16.818.816.793 atau 98,68%. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Penun-jang Urusan Pemerintah Daerah Ka-bupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Urusan Pertanahan telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan. Alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.436.695.827,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.490.339.660,00 atau 102,20%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, dan Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan.

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 13.839.950.545,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.109.548.550,00 atau 94,72%. Adapun program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dan Program Pengelolaan Persampahan.

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 5.050.937.376,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.903.003.176,00 atau 97,07%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,Informatika dan Persandian. Alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.359.609.831,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.193.894.016,00 atau 95,06%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penyelenggaraan Per-sandian Untuk Pengamanan Informasi.

Urusan Perdagangan telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 8.766.606.969,00 dengan rea-lisasi sebesar Rp 8.515.476.579,00 atau 97,13%. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pem-berdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlin-dungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi In-dustri Nasional.

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun 2022 alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp 4.435.624.481,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.302.838.852,00 atau 97,00%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program penunjang urusan pemerintahan dae-rah kabupaten/kota, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pegendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pegelolaan data dan Modal Sistem Informasi Pena-naman Modal dan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 23.147.657.592,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.950.314.550,00 atau 99,14%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Ke-arsipan. Alo-kasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 3.621.397.443,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.529.479.688,00 atau 97,46%. Adapun program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pembinaan Perpustakaan, dan Program Pengelolaan Arsip.

Urusan Pertanian dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perke-bunan pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 50.702.368.346,00 dengan realisasi sebesar Rp 47.039.962.370,00 atau 92,77%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.

Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10.620.187.434,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.849.860.066,00 atau 92,74%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Peternakan dan Program Pengenda-lian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

4. Urusan Keistimewaan.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Khusus di Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Baitul Mal, dan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

Program dan kegiatan Syariat Islam dilaksanakan oleh Dinas Sya-riat Islam pada ta-hun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 13.456.124.092,00 dengan realisasi Rp 13.135.630.733,00 atau 97,61%. Adapun program yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Syariat Islam Aceh.

Program dan kegiatan urusan pendidikan Dayah yang dilaksanakan oleh Dinas Pen-didikan Dayah pada tahun 2022 mendapat alokasi sebesar Rp 17.563.466.508,00 dengan realisasi Rp 17.335.069.516,00 atau mencapai 98,69%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program – program sebagai berikut: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendidikan Dayah.

Program dan kegiatan Majelis Adat Aceh dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh, adapun alokasi anggaran yang diterima pada tahun 2022 sejumlah Rp 1.589.687.316,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.479.548.055,00 atau 93,07 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Majelis Adat Aceh.

Program dan kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama di laksanakan oleh Sekretari-at Majelis Permusyawaratan Ulama pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.545.592.067,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.532.566.674,00 atau 99,48%. Adapun pro-gram yang dilaksanakan adalah: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupat-en/Kota, Program Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU) Aceh.

Program dan kegiatan Baitul Mal dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 23.855.306.026,00 dengan realisasi Rp 7.149.024.701,00 atau 29,96%. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Penun-jang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Baitul Mal.

Program dan kegiatan Majelis Pendidikan Aceh, dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.243.719.488,00 dengan realisasi Rp 1.210.070.449,00 atau 97,29%. Adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh.

5. Indeks Pembangunan Manusia.

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional. Capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,28	72,33	0,07
2	Angka Kemiskinan	13,25	13,51	-5,58
3	Angka Pengangguran	4,32	4,2	-2,78
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,13	4,31	4,36
5	PDRB Pendapatan Per kapita (juta rupiah)	39,96	34,73	8,67
6	Gini Ratio	0,296	0,275	-7,09

6. Tugas Pembantuan.

Selain urusan-urusan tersebut di atas, juga dilaksanakan tugas pembantuan, dan pa-da tahun 2022 tugas pembantuan meliputi Urusan Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

7. Tugas Umum Pemerintahan.

Tugas Umum Pemerintahan meliputi Kerja Sama Antar Daerah, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam, Pengelolaan Kawasan Khusus serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini kami sampaikan, guna memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ring-kasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Disampaikan Oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Amin.

Bireuen, Oktober 2023

Pj. Bupati Bireuen,

dto

AULIA SOFYAN, Ph.D